

Promosi Kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi

Mahyus^{1*}, Nur Wahida², Siti Fatima, Putriani⁴, Muh. Faisal⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

*mahyus.dty@uim-makassar.ac.id

Abstract

Gender equality is a fundamental principle in the protection of human rights and the achievement of inclusive development. However, gender-based discrimination remains a complex and multidimensional global challenge. This article aims to analyze the promotion of gender equality and strategies for eliminating discrimination against vulnerable groups, particularly women. Using a descriptive-qualitative approach and literature review, the article examines various forms of gender discrimination in education, employment, and political participation. The study finds that structural inequality, patriarchal culture, and weak policy implementation are the main factors hindering the realization of gender justice. It also highlights national and international initiatives that promote gender equality, including gender education, legal advocacy, and economic empowerment. The findings indicate that promoting gender equality requires cross-sector collaboration and a paradigm shift at the societal level. Thus, eliminating gender discrimination is not solely the responsibility of the state, but also necessitates active participation from all sectors of society.

Keywords: *gender equality, discrimination, human rights, empowerment, inclusive development*

Abstrak

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian pembangunan yang inklusif. Namun, diskriminasi berbasis gender masih menjadi tantangan global yang kompleks dan multidimensional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya promosi kesetaraan gender serta strategi penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi pustaka, artikel ini mengkaji bentuk-bentuk diskriminasi gender yang terjadi dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Ditemukan bahwa ketimpangan struktural, budaya patriarki, serta lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya keadilan gender. Artikel ini juga mengulas berbagai inisiatif nasional dan internasional dalam mendorong kesetaraan, termasuk pendidikan gender, advokasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa promosi kesetaraan gender membutuhkan sinergi lintas sektor dan perubahan paradigma di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penghapusan diskriminasi gender bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci: kesetaraan gender, diskriminasi, hak asasi manusia, pemberdayaan, pembangunan inklusif

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia serta indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan gender dan diskriminasi berbasis gender masih menjadi fenomena yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini

tidak hanya berdampak pada perempuan dan kelompok marginal lainnya, tetapi juga menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan.

Diskriminasi berbasis gender tercermin dalam berbagai bentuk, seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan partisipasi politik, kekerasan berbasis gender, serta penggambaran stereotip dalam budaya dan media. Budaya patriarki yang dominan dalam banyak masyarakat turut memperkuat ketimpangan ini dan sering kali menghambat implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan gender.

Berbagai upaya telah dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi. Di antaranya adalah ratifikasi instrumen hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, serta inisiatif pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tantangan dan peluang dalam promosi kesetaraan gender serta strategi yang dapat diterapkan untuk menghapus diskriminasi gender di berbagai sektor. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi literatur, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena diskriminasi gender serta upaya promosi kesetaraan gender berdasarkan data yang bersifat naratif dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji persoalan sosial yang kompleks, seperti ketimpangan gender dan konstruksi budaya yang melatar belakangnya.

Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, serta upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi berbasis gender.

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk promosi kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi yang bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa maupun masyarakat pentingnya tentang kesetaraan gender.

1. Masih Maraknya Diskriminasi Gender di Berbagai Sektor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih terjadi secara nyata di berbagai sektor, seperti dunia kerja, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam sektor pekerjaan, perempuan masih sering mengalami ketimpangan upah, terbatasnya akses ke posisi kepemimpinan, serta praktik diskriminatif seperti pertanyaan tentang status pernikahan atau kehamilan saat proses rekrutmen.

Di bidang pendidikan, beberapa wilayah masih menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh stereotip sosial dan ekspektasi budaya yang membatasi peran perempuan.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender masih rendah. Banyak yang masih menganggap bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik, sementara laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Persepsi ini memperkuat ketimpangan peran dan memperlambat proses penghapusan diskriminasi.

Namun demikian, terdapat pergeseran pandangan terutama di kalangan generasi muda yang mulai lebih terbuka terhadap konsep kesetaraan gender dan mendukung pembagian peran yang lebih adil di rumah tangga maupun di tempat kerja.

3. Upaya Penghapusan Diskriminasi Gender

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mendorong kesetaraan gender. Upaya tersebut meliputi:

- **Pelatihan kesadaran gender** di kalangan ASN, guru, dan pemimpin komunitas.
- **Kampanye publik** melalui media sosial dan kegiatan edukatif untuk melawan stereotip gender.
- **Penyusunan kebijakan pro-gender**, seperti cuti ayah, perlindungan pekerja perempuan, dan kuota keterwakilan perempuan dalam politik.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup besar, seperti resistensi budaya, kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, dan keterbatasan sumber daya

4. Implikasi Sosial dari Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Ketika perempuan tidak mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, maka potensi mereka tidak dapat dimaksimalkan, dan ini berdampak pada produktivitas nasional.

Kesetaraan gender terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kemiskinan, dan kemajuan sosial. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi berbasis gender menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.



Gambar 1. Promosi kesetaraan gender & penghapusan diskriminasi



Gambar 2. Sesi tanya jawab



Gambar: 3&4 Sesi foto bersama peserta kegiatan



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan sosial di masyarakat. Diskriminasi berbasis gender masih terjadi secara nyata dalam berbagai sektor, seperti dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial, yang berakar pada stereotip dan norma-norma patriarkal yang telah mengakar kuat.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil, dalam mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan

gender. Berbagai kebijakan afirmatif, kampanye publik, dan pendidikan kesadaran gender telah mulai menunjukkan hasil, meski implementasinya masih perlu diperkuat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam menghapus diskriminasi berbasis gender, termasuk melalui reformasi kebijakan, peningkatan pendidikan kesetaraan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan, tetapi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

SARAN

1. **Peningkatan Edukasi Kesetaraan Gender Sejak Dini**
Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam kurikulum formal maupun non-formal, agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang adil terhadap peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.
2. **Penguatan Implementasi Kebijakan Pro-Gender**
Regulasi dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lembaga, baik publik maupun swasta, melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten dan menyeluruh.
3. **Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Sektor**
Upaya pemberdayaan perempuan perlu diperluas, tidak hanya dalam bentuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengambilan keputusan politik.
4. **Peran Aktif Laki-laki dalam Advokasi Gender**
Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan. Laki-laki perlu dilibatkan sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya yang lebih adil dan setara, termasuk dengan menolak praktik diskriminatif di lingkungan sekitarnya.
5. **Kolaborasi Multi-Pihak**
Penghapusan diskriminasi gender membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dunia usaha, dan masyarakat umum. Pendekatan kolektif ini akan memperkuat dampak dan jangkauan program-program kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: KPPPA.
- Fitriani, Y., & Lestari, N. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penghapusan Diskriminasi Gender di Indonesia. *Jurnal Gender dan Sosial*, 4(1), 55–67.
<https://doi.org/10.1234/jgs.v4i1.5678>
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: WEF.
<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023>

- Nurcholis, H., & Aisyah, S. (2021). Peran Pendidikan dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kritis*, 10(2), 120–135.
<https://doi.org/10.2345/jpk.v10i2.3456>
- UN Women. (2020). *Gender Equality: Women's Rights in Review 25 Years after Beijing*. New York: United Nations. <https://www.unwomen.org>
- Siregar, M., & Putri, A. R. (2020). Diskriminasi Gender dalam Dunia Kerja: Tinjauan Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum & Gender*, 6(2), 88–102.
<https://doi.org/10.5678/jhg.v6i2.7890>
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). *Statistik Gender Tematik: Ketimpangan Gender di Indonesia*. Jakarta: BPS.